BPBD
KABUPATEN BANYUMAS

2023

DOKUMEN RTP
BPBD

Kabupaten Banyumas

BAB I
GAMBARAN UMUM

A. PENDAHULUAN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Guna menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP. Sistem pengendalian intern yang dibangun akan efektif dan efisien jika dirancang dengan tepat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang stategis dalam upaya mengintegrasikan konsep SPIP ke dalam kegiatan dan tindakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

1. Latar Belakang

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih pada Kabupaten Banyumas. Visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

"Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri"

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas mengacu pada misi kelima yaitu :

1. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan

Sebagai arahan untuk mewujudkan Visi dan Misi yang ditetapkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas memiliki tujuan yaitu mengurangi risiko bencana.

Tujuan tersebut diatas dapat tercapai jika SPIP berjalan dengan baik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas memerlukan suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas. RTP merupakan uraian

mengenai desain rencana pengendalian atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Banyumas sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum implementasi penyelenggaraan SPIP pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas adalah:

1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
4) Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
5) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah.

3. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

4. Manfaat

Manfaat penyusunan dokumen RTP di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut :

1) Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari.

2) Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP
3) Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP.
4) Sebagai dasar penyusunan *Statement of Responsibilities* (SOR).

5. Ruang Lingkup

RTP ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah dtetapkan di tingkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan RTP melibatkan seluruh jajaran pimpinan/tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas.

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan RTP Tahun 2023 mengacu pada Program dan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

BAB II
SEKILAS TENTANG SPIP

1. Pengertian SPIP

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

2. Tujuan SPIP

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

3. Unsur-unsur SPIP

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah sebagai berikut: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Adapun penyelenggaraan SPIP pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas berkaitan dengan unsur-unsurnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan (*management*

oversight) untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang tepat. Selain itu, dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas.

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kabupaten Banyumas.

Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko. Penilaian risiko dilakukan atas:

- Penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah;
- Penilaian risiko strategis OPD; dan
- Penilaian risiko operasional/kegiatan OPD.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakterisitik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

1)Diutamakan pada kegiatan/tujuan pokok.

2)Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;

3)Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur tertulis

4)Dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

5) Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian .

d. Informasi dan Komunikasi ,

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan mengelola dan mengendalikan instansi. Informasi dan komunikasi yang memadai dimaksudkan agar dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas harus menyelenggarakan Sistem Informasi supaya dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi capaian kinerja, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di samping itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas juga harus menyelenggarakan sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern. Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas harus memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja/unit:

- Informasi ke atas untuk memastikan bahwa pimpinan mengetahui risiko dan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas. Saluran informasi ini harus dapat merespon untuk pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.
- Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas serta kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada para manajer di tingkat bawah dan para pelaksana.
- Informasi lintas satuan kerja/unit untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan

dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Dalam rangka meyakinkan bahwa revisi kebijakan dan prosedur dilaksanakan oleh para penanggung jawab kegiatan serta untuk meyakinkan bahwa kebijakan dan prosedur yang direvisi dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mengatasi risiko-risiko yang ada maka harus dilakukan monitoring oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas terkait implementasi perbaikan kebijakan dan prosedur serta efektifitas kebijakan dan prosedur yang diperbaiki dalam mengatasi risiko-risiko yang ada. Rencana monitoring atas perbaikan/pembuatan Kebijakan dan Prosedur serta pelaksanaan kebijakan dan prosedur hasil revisi dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mengatasi risiko-risiko, harus ditetapkan agar kegiatan pengendalian yang akan dilakukan monitoring atau evaluasi dapat tercapai dengan baik.

4. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 (Pasal 56 ayat (4) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Kepala Daerah dengan jajarannya (Kepala SKPD) selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyatan tersebut dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang diselenggarakan secara memadai. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. RTP merupakan sarana untuk mendukung SPIP dan tertuang dalam dokumen RTP.

BAB III
LINGKUNGAN PENGENDALIAN

1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/ kegagalan penerapan SPI. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Pembangunan lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kabupaten Banyumas bertujuan untuk:

a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika
b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat
f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

2. Kondisi Lingkungan Pengendalian

Kondisi Lingkungan Pengendalian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas secara umum cukup memadai. Hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas diperoleh gambaran sebagai berikut:

No	Sub. Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggungjawab yang Tepat	Memadai
6	Kebijakan yang Sehat Pengembangan SDM	Memadai
7	Pengawasan Internal yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah	Memadai

Survei persepsi yang telah dilaksanakan BPBD Kabupaten Banyumas melibatkan ASN pada BPBD Kabupaten Banyumas sebagai responden. Responden ditetapkan sebanyak 16 (enam belas) dari total pegawai 30 (tiga puluh) terdiri dari pejabat struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum. Penetapan jumlah responden untuk memenuhi minimal responden yaitu 30% dari total pegawai. Berdasarkan survei persepsi pada 8 (delapan) sub unsur lingkungan pengendalian menunjukkan hasil bahwa semua sub unsur memadai

3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Atas kelemahan lingkungan pengendalian yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut :

No	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Menginformasikan pelaksanaan aturan perilaku kepada seluruh pegawai
2	Komitmen Terhadap Kompetensi	Meningkatkan kompetensi sumber da
3	Struktur Organisasi yang Sesuai Dengan Kebutuhan	Evaluasi SOTK sesuai kebutuhan dan ketercukupan jumlah aparatur untuk menunjang Program dan Kegiatan
4	Pendeleagasian Wewenang dan Tanggungjawab	Pendelegasian wewenang yang telah dilimpahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai Peraturan Bupati
5	Kebijakan Pengembangan SDM	Melakukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai melalui bintek, diklat dan pelatihan
6	Pengawasan Internal	Evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan

Rincian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran

BAB IV

PENILAIAN RISIKO

1. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketataan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam tahun 2018, Rencana Tindak Pengendalian yang disusun BPBD Kabupaten Banyumas diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan/sasaran sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas hasil pelayanan penanggulangan bencana;
b. Mengoptimalkan hasil pelaksanaan kegiatan Pra, Saat dan Pascabencana;
c. Meningkatkan pelayanan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
d. Mendorong dan meningkatkan peran serta organisasi masyarakat peduli bencana;
e. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana

2. Risiko-risiko

Dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi tahun 2018 tersebut, telah dilakukan identifikasi atas risiko-risiko dan permasalahan-permasalahan yang akan mengganggu tercapainya tujuan. Risiko-risiko dimaksud meliputi risiko yang teridentifikasi berdasarkan permalsalahan yang ditemukan dan risiko yang teridentifikasi yaitu :

Risiko Strategis	
1	Adanya risiko kurangnya Ketahanan Daerah
Risiko Strategis	
1	Korban bencana yang tidak tertolong/terselamatkan
2	Beredarnya informasi palsu/hoax seputar informasi kebencanaan
3	Tidak siapnya masyarakat/wilayah untuk menghadapi bencana skala yang besar

Rincian identifikasi risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran. Terhadap risiko-risiko pada daftar risiko tersebut telah dilakukan analisis berupa penetapan penyebab, dampak yang terjadi bila risiko tersebut terjadi dan dilakukan pemetaan. Hasil analisis risiko menunjukan 4 pernyataan risiko, 4 risiko berada pada level rendah. Perincian risiko selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.

3. Pengendalian Terpasang

Sampai dengan saat ini, Badan Penanggualngan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas telah membangun beberapa pengendalian. Beberapa pengendalian dinilai telah efektif namun beberapa lainnya kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan. Pengendalian yang telah terpasan, antara lain adalah sebagai berikut :

a. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas;
b. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas Ta;
c. Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 700/0793/2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas;
d. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana;
e. Peraturan-peraturan di bidang kepegawaian;
f. SOP di bidang pelayanan publik.

4. Kegiatan Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan

Penyelenggaraan aktivitas pengendalian yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas memiliki karakteristik pada kegiatan utama dan sifat khusus, harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko, kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis dan dilaksanakan serta dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pencapaian tujuan prioritas yang ditetapkan. Aktivitas pengendalian yang akan dilaksanakana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas terkait dengan hasil penilaian risiko yang

berdampak pada pencapaian tujuan tercapaianya peningkatan kualitas hasil pengawasan, mengoptimalkan hasil pengawasan adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait;
b. Melakukan koordiinasi dengan rapat, sosialisasi dan sinkronisasi data;
c. Pendataan dokumen dengan menggunakan dokumen arsip;

BAB V

KEGIATAN PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan pernbaikan diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan Evaluasi yang akan dilaksanakan tersebut meliputi :

1. Pemantauan Berkelanjutan

   Pemantauan berkelanjutan dilaksanan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankkan sebagaimana seharusnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas membangun dan melaksanakan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan yang perlu dilakukan meliputi sebagai berikut :

   a. Pemantauan pelaksanaan sosialisasi kode etik dan perilaku pegawai;
   b. Evaluasi atas penerapan standar kompetensi dan penempatan SDM;
   c. Supervisi pelaksanaan penatausahaan pajak;
   d. Supervisi pelaksanaan tugas Bendahara Pengeluaran;
   e. Verifikasi penganggaran dan pengadaan persediaan;
   f. Pemantauan pelaksanaan inventasisasi aset dan pelaksanaan verifikasi penghapusan aset;
   g. Pemantauan pelaksanaan Sosialisasi SOP dan SP;
   h. Reviu atas Realisasi Belanja OPD;
   i. Pemantauan berkelanjutan atas pengendalian tertuang dan terintegrasi dalam kebijakan dan prosedur pengendalian.

2. Evaluasi Terpisah

   Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP pada Sekretariat dan bidang-bidang pada akhir tahun. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif

3. Pelaksanaan Tindak Lanjut

   Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal maupun internal, setiap unit kerja SKPD melaksanakan

tindaklanjutnya. Tindak Lanjut yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Banyumas terhadap temuan dan rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya adalah :

a. Melaksanakan tindaklanjut yang sesuai dengan materi temuan dan rekomendasi
b. Menyampaikan laporan pelaksanaan tindaklanjut dan status penyelesaian rekomendasi secara berkala
c. Memantau perkembangan pelaksanaan tindaklanjut atas rekomendasi guna meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaskanakan

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas memberikan laporan atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian sesuai tanggungjawabnya secara berkala kepada tim pemantau. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada Bupati Banyumas.

BAB VI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Rencana perbaikan Pengendalian yang akan dilaksanakan untuk mengatasi risiko yang telah disusun ini, agar lebih efektif harus dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Komunikasi yang efektif sangat dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dapat melakukan perbaikan pengendalian secara efektif. Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi :

1. Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
2. Kebijakan di-upload dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
3. Sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan,
4. Pembuatan surat edaran tentang pelaksanaan diklat, evaluasi kompetensi, reviu kinerja dan penempatan SDM,
5. Sosialisasi dalam rangka pengendalian kegaitan,
6. Sosialisasi berbagai Standar Pelayanan.

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam Lampiran I,

BAB VII
PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan Evaluasi yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

   Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 9 (kolom f dan g).*

2. Pemantauan kejadian risiko

   Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 10 (kolom d – g, dan kolom j – k).*

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPIP dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrument untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan sesuai RTP ini dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun.

Purwokerto, Februari 2023

KEPALA PELAKSANA BPBD

KABUPATEN BANYUMAS

BUDI NUGROHO, S.STP., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19780522 199703 1 003

LAMPIRAN

No	Pertanyaan/ Kuisioner	JAWABAN KORESPONDED (R)																		KESIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	Modus	
A	**PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA**																			**Memadai**
1	Telah terdapat fungsi khusus di dalam OPD yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	Memadai
2	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti	3	3	3	4	4	3	4	3	4	3	2	3	3	4	4	3	3	3	Memadai
3	Pegawai mendapatkan pesan integritas dan nilai etika secara rutin dari pimpinan Pemkab/OPD (misalnya keteladanan, pesan moral dll)	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	Memadai
4	Pemkab/OPD telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	Memadai
B	**KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI**																			**Memadai**
1	OPD telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	3	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	Memadai

2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	4	3	3	4	3	4	2	4	4	4	4	3	2	4	4	3	4	4	Memadai
3	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	4	3	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	Memadai
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	3	3	3	4	4	3	2	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	3	Memadai
C	**KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF**																			**Memadai**
1	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	4	Memadai
2	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	Memadai
3	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	Memadai

4	Rencana/sasaran strategis Pemda telah dijabarkan kedalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	Memadai
5	Rencana strategis dan rencana kerja OPD telah menyajikan informasi mengenai risiko	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	Memadai
6	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	Memadai
7	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	Memadai
8	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	Memadai
D	**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN**																			**Memadai**
1	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	Memadai

2	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	Memadai
3	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	3	4	4	Memadai
4	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	Memadai
E	**PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT**																			**Memadai**
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	3	4	3	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	Memadai
2	Kewenangan direviu secara periodik	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	Memadai
3	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	Memadai

F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA																			Memadai
1	OPD telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	Memadai
2	OPD telah menginternalisasi budaya sadar risiko	4	4	3	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	4	Memadai
3	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	Memadai
4	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	3	3	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	Memadai
5	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	Memadai
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	Memadai

7	OPD telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	4	3	4	4	4	4	4	2	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	Memadai
G	**PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF**																			**Memadai**
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	Memadai
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	Memadai
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3	Memadai
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	Memadai
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	4	Memadai

H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT																			Memadai
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	Memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (Inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	Memadai

Form 1.b MRI

CEE BERDASARKAN DOKUMEN KONDISI KERENTANAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN

BPBD KABUPATEN BANYUMAS

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas
Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun Penilaian: 2023
Urusan : Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Sumber Data	Uraian Kelemahan	Uraian Kekuatan	Klasifikasi
1	Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 700/ 84.PKPT/ 198/ IRBAN.I/ ST.061/ 2022 tanggal 27 Juli 2022	Evaluasi Kinerja dan Pengukuran Kinerja Terhadap Tim Reaksi Cepat	Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN
2	Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 700/1199/2022 tanggal 4 Juli 2022	BPBD belum melaksanakan monitoring evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik, penanganan pengaduan masyarakat, dan penanganan benturan kepentingan	SK Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas Nomor 800/008/Tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada BPBD Kabupaten Banyumas Tahun 2021	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF

Form 1.c MRI

SIMPULAN SURVEI PERSEPSI LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
BPBD KABUPATEN BANYUMAS

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas
Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun Penilaian : 2023
Urusan : Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Sub Unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
1	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	-		Memadai		-	
2	Komitmen Terhadap Kompetensi	-		Memadai		-	
3	Kepemimpinan Yang Kondusif	Memadai	BPBD belum melaksanakan monitoring evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik, penanganan pengaduan masyarakat, dan penanganan benturan kepentingan	Memadai		Memadai	BPBD belum melaksanakan monitoring evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik, penanganan pengaduan masyarakat, dan penanganan benturan kepentingan
4	Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan	Memadai	Evaluasi Kinerja dan Pengukuran Kinerja Terhadap Tim Reaksi Cepat	Memadai		Memadai	Evaluasi Kinerja dan Pengukuran Kinerja Terhadap Tim Reaksi Cepat
5	Pendelegasian Wewenang Dan Tanggung Jawab Yang Tepat	-		Memadai		-	
6	Penyusunan Dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	-		Memadai		-	
7	Perwujudan Peran APIP Yang Efektif	-		Memadai		-	
8	Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Instansi Pemerintah Terkait	-		Memadai		-	

Form 2.b MRI

PENATAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS

BPBD KABUPATEN BANYUMAS

Nama Pemda	:	Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	:	2023
Periode Yang Dinilai	:	RPJMD Perubahan 2018-2023
Urusan Pemerintahan	:	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
OPD Yang Dinilai	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sumber Data	:	Renstra Perubahan 2018-2023
Tujuan Strategis	:	Mengurangi Risiko Bencana
Sasaran Strategis	:	Meningkatkan Kapasitas Kabupaten Banyumas Dalam Menghadapi Bencana
Indikator Kinerja Sasaran Renstra OPD	:	IKU 1. Indeks Ketahanan Daerah : 0,80 Indeks
Informasi Lain	:	-
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	:	Tujuan 1: Mengurangi Risiko Bencana
		Sasaran 1.1: Meningkatkan Kapasitas Kabupaten Banyumas Dalam Menghadapi Bencana
		Ind Sasaran 1.1.1: Indeks Ketahanan Daerah
		Program 1.1.1.1: Program Penanggulangan Bencana

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN BANYUMAS

PEMERINTAH KABUPATEN BPBD BANYUMAS

BUDI NUGROHO, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19780522 199703 1 003

Form 2.c MRI

PENATAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL
BPBD KABUPATEN BANYUMAS

Nama Pemda	:	Pemerintah Kabupaten Banyumas	
Tahun Penilaian	:	2023	
Periode Yang Dinilai	:	RPJMD Perubahan 2018-2023	
Urusan Pemerintahan	:	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
OPD Yang Dinilai	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Sumber Data	:	Renstra Perubahan 2018-2023	
Tujuan Strategis	:	Mengurangi Risiko Bencana	
Program OPD (Renja 2022) dan Kegiatan Utama	:	1 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
		a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
		b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
		c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
		d. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
Keluaran/Hasil Kegiatan	:	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | Target: 110000 Orang	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Target: 250 Orang	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Target: 1100 Orang	
		Jumlah pelayanan sistem dasar penanggulangan bencana | Target: 2 pelayanan	
Informasi Lain	:	-	
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian	:	Kegiatan	Indikator
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | Target: 110000 Orang
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Target: 250 Orang
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Target: 1100 Orang

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN BANYUMAS

BUDI NUGROHO, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19780522 199703 1 003

Form 3.b MRI

FORMULIR KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas
Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun Penilaian : 2023
Periode Yang Dinilai : Renstra Perubahan Tahun 2018-2023
Urusan Pemerintahan : Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Tujuan : Mengurangi Risiko Bencana
Sasaran Strategis : Meningkatkan Kapasitas Kabupaten Banyumas Dalam Menghadapi Bencana

No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
		Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
1	Indeks Ketahanan Daerah	Tidak adanya evaluasi ruang lingkup Indeks Ketahanan Daerah	105	BPBD Kabupaten Banyumas	Perhitungan Ancaman dan Kerentanan (Formulasi) IRB hanya diketahui BNPB	Eksternal	UC	Sulit memperhitungkan perkiraan nilai Indeks Ketahanan Daerah	BPBD Kabupaten Banyumas	BPBD Kabupaten Banyumas
					Kurangnya pemahanan terhadap Indeks Ketahanan Daerah	Internal	C	Tidak diketahuinya Indeks Ketahanan Daerah	Kabupaten Banyumas	

Form 3.c MRI

FORMULIR KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas
Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun Penilaian : 2023
Periode Yang Dinilai : Renstra Perubahan Tahun 2018-2023
Urusan Pemerintahan : Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Tujuan : Mengurangi Risiko Bencana
Sasaran Strategis : Meningkatkan Kapasitas Kabupaten Banyumas Dalam Menghadapi Bencana

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Korban bencana yang tidak tertolong/terselamatkan	105	BPBD Kabupaten Banyumas	Banyaknya korban bencana yang harus ditolong, sehingga membutuhkan waktu untuk menyelamatkan seluruh korban	Internal	UC	Bertambahnya korban bencana	Masyarakat	BPBD
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Beredarnya informasi palsu/hoax seputar informasi kebencanaan	105	BPBD Kabupaten Banyumas	Masyarakat menyebarkan berita palsu melalui media sosial	Eksternal	UC	Menimbulkan kepanikan kepada masyarakat	Masyarakat	BPBD
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Tidak siapnya masyarakat/wilayah untuk menghadapi bencana skala yang besar	105	BPBD Kabupaten Banyumas	Kurangnya sarpras penanggulangan bencana	Eksternal	C	Pencegahan dan Kesiapsiagaan menghadapi bencana yang berskala besar kurang	Masyarakat	BPBD

Form 4 MRI

FORMULIR KERTAS KERJA HASIL ANALISIS RISIKO

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas
Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun Penilaian : 2023
Tujuan : Mengurangi Risiko Bencana
Urusan Pemerintahan: Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Risiko Yang Teridentifikasi	Kode RIsiko				Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
Risiko Strategis								
1	Tidak adanya evaluasi ruang lingkup Indeks Ketahanan Daerah	RSO.23	105	08	08	4.4	2.4	10.56
Risiko Operasional								
1	Beredarnya informasi palsu/hoax seputar informasi kebencanaan	RSO.23	105	08	08	1.9	4.7	8.93
2	Tidak siapnya masyarakat/wilayah untuk menghadapi bencana skala yang besar	RSO.23	105	08	08	3.3	3.2	10.56
3	Korban bencana yang tidak tertolong/terselamatkan	RSO.23	105	08	08	4.3	2.2	9.46

Keterangan :

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi	20-25	Merah
Tinggi	16-19	Orange
Sedang	12-15	Kuning
Rendah	6-11	Biru
Sangat Rendah	1-5	Hijau

Form 5 MRI

FORMULIR KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas
Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun Penilaian : 2023
Periode Yang Dinilai : Renstra Perubahan Tahun 2018-2023
Urusan Pemerintahan : Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Tujuan : Mengurangi Risiko Bencana
Sasaran Strategis : Meningkatkan Kapasitas Kabupaten Banyumas Dalam Menghadapi Bencana

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
Risiko Strategis									
1	Tidak adanya evaluasi ruang lingkup Indeks Ketahanan Daerah	RSO.23	105	08	08	10.56	BPBD	Kurangnya pemahanan terhadap Indeks Ketahanan Daerah	Tidak diketahuinya Indeks Ketahanan Daerah
								Perhitungan Ancaman dan Kerentanan (Formulasi) IRB hanya diketahui BNPB	Sulit memperhitungkan perkiraan nilai Indeks Ketahanan Daerah
Risiko Operasional									
1	Beredarnya informasi palsu/hoax seputar informasi kebencanaan	ROO.23	105	08	08	8.93	BPBD	Masyarakat menyebarkan berita palsu melalui media sosial	Menimbulkan kepanikan kepada masyarakat
2	Tidak siapnya masyarakat/wilayah untuk menghadapi bencana skala yang besar	ROO.23	105	08	08	10.56	BPBD	Kurangnya sarpras penanggulangan bencana	Pencegahan dan Kesiapsiagaan menghadapi bencana yang berskala besar kurang
3	Korban bencana yang tidak tertolong/terselamatkan	ROO.23	105	08	08	9.46	BPBD	Banyaknya korban bencana yang harus ditolong, sehingga membutuhkan waktu untuk menyelamatkan seluruh korban	Bertambahnya korban bencana

Form 6 MRI

FORMULIR KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas
Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun Penilaian : 2023
Periode Yang Dinilai : Renstra Perubahan Tahun 2018-2023
Urusan Pemerintahan : Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian Yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada	Efektifitas	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF							
1	Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 700/1199/2022 tanggal 4 Juli 2022	Melaksanakan monitoring evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik, penanganan pengaduan masyarakat, dan penanganan benturan kepentingan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan monitoring evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik, penanganan pengaduan masyarakat, dan penanganan benturan kepentingan secara menyeluruh	BPBD	Triwulan III Tahun 2023
KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF							
1	Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 700/84.PKPT/198/IRBAN.I/ST.061/2022 tanggal 27 Juli 2022	Membentuk Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Banyumas	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Membentuk Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Per Kluster dan Tim Reaksi Cepat Multisektoral	BPBD	Triwulan III Tahun 2023

Keterangan :
E : Efektif
KE : Kurang Efektif
TE : Tidak Efektif

Form 7 MRI

FORMULIR KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas
Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun Penilaian : 2023
Tujuan : Mengurangi Risiko Bencana

No	Risiko Prioritas	Uraian Pengendalian Yang Sudah Ada	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
Risiko Strategis							
1	Tidak adanya evaluasi ruang lingkup Indeks Ketahanan Daerah	Pelaksanaan Penilaian Indeks Ketahanan Daerah	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Sosialisasi dan Evaluasi Indeks Ketahanan Daerah	Kepala Pelaksana BPBD	Triwulan ke IV Tahun 2023
Risiko Operasional							
1	Beredarnya informasi palsu/hoax seputar informasi kebencanaan	Menyebarkan informasi seputar bencana melalui media sosial	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh berita palsu/hoax	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Triwulan ke-III Tahun 2023
2	Tidak siapnya masyarakat/wilayah untuk menghadapi bencana skala yang besar	Melaksanakan sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi kepada masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Menyebarkan informasi melalui media sosial	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Triwulan ke-III Tahun 2023
3	Korban bencana yang tidak tertolong/terselamatkan	Menolong dan menyelamatkan korban bencana	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Membentuk Tim TRC Kluster Evakuasi Bencana	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Triwulan ke-III Tahun 2023

Keterangan :
E : Efektif
KE : Kurang Efektif
TE : Tidak Efektif

Lampiran
Form 8 MRI

RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN							
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							
No	**Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan**	**Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian**	**Penyedia Informasi**	**Penerima Informasi**	**Rencana Waktu Pelaksanaan**	**Realisasi Waktu Pelaksanaan**	**Keterangan**
Risiko Strategis							
1	Sosialisasi dan Evaluasi Indeks Ketahanan Daerah	Rapat	BPBD	Stakeholder (DPU, DLH, Dinperkim, Bappedalitbang)	Triwulan IV Tahun 2023		
Risiko Operasional							
1	Mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh berita palsu/hoax	Media Sosial	BPBD	Masyarakat Kabupaten Banyumas	Triwulan III Tahun 2023		
2	Menyebarkan informasi melalui media sosial	Media Sosial	BPBD	Masyarakat Kabupaten Banyumas	Triwulan III Tahun 2023		
3	Membentuk Tim TRC Kluster Evakuasi Bencana	SK Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas	BPBD	TRC-PB BPBD Kabupaten Banyumas	Triwulan III Tahun 2023		

Lampiran
Form 9 MRI

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN						
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						
No	**Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan**	**Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan**	**Penanggungjawab Pemantauan**	**Rencana Waktu Pemantauan**	**Realisasi Waktu Pemantauan**	**Keterangan**
Risiko Strategis						
1	Sosialisasi dan Evaluasi Indeks Ketahanan Daerah	Rapat	BPBD Kabupaten Banyumas	Triwulan IV Tahun 2023		
Risiko Operasional						
2	Mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh berita palsu/hoax	Media Sosial	BPBD Kabupaten Banyumas	Triwulan III Tahun 2023		
	Menyebarkan informasi melalui media sosial	Media Sosial	BPBD Kabupaten Banyumas	Triwulan III Tahun 2023		
	Membentuk Tim TRC Kluster Evakuasi Bencana	SK Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas	BPBD Kabupaten Banyumas	Triwulan III Tahun 2023		